



RTHP Berpotensi Besar Ungkit Ekonomi

■ Legislatif Dorong Pembangunan Infrastruktur Berdampak Bagi Warga Sekitar

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif mendesak Pemkot Yogyakarta untuk memaksimalkan deretan infrastruktur yang sudah dibangun sebagai sarana pengungkit perekonomian masyarakat.

Salah satu infrastruktur yang punya potensi besar adalah Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP), yang telah terealisasi hampir di seluruh Kelurahan di Kota Yogya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogya, Ririk Banowati, mengatakan, bahwa konsep infrastruktur berkelanjutan tidak boleh hanya memandang satu aspek saja. Tetapi, ada tiga aspek yang harus tercakup dalam merealisasikan pembangunan sebuah daerah, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

"Prinsipnya, ketika ada pembangunan di wilayah, maka warga setempat harus terdampak ekonominya," ujarnya, di sela talkshow Dewan Menyapa, Kamis (21/3) sore. Namun, pihaknya menilai, hal tersebut belum sepenuhnya tercapai di Kota Yogyakarta, lantaran pemanfaatan RTHP untuk aktivitas ekonomi kurang diatur secara riig. Dalam artian, belum ada payung hukum yang secara gamblang mengatur legalitas kegiatan para pelaku UMKM di ruang-ruang publik yang dibangun oleh Pemkot Yogyakarta.

"Bahkan, harapan kami tidak hanya RTHP, tapi juga sarana lain yang bisa berdampak kepada ungkitan ekonomi. Itu, kan, bisa diatur melalui Perwal, atau bahkan Perda, yang lebih kuat," ujarnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Yogya, Cahyo Wibowo, menambahkan, ketika aspek kebutuhan dasar dan estetika terpenuhi, Pemkot pun harus memikirkan ungkitan ekonomi dari infrastruktur yang dibangun. Menurutnya, pemerintah daerah harus berkaaca pada sepak terjang presiden Joko Widodo, yang begitu gencar melakukan pembangunan infrastruktur untuk memajukan ekonomi sebuah kawasan.

"Kalau tidak ada ungkitan ekonominya, warga di sekitar RTHP cuek, tidak ada rasa memiliki. Ya, mau bagaimana lagi, wong mereka mau jual camilan saja tidak boleh," ungkapnya.

Namun, pihaknya memahami, ungkitan ekonomi tidak dapat terealisasi maksimal karena memang belum ada payung hukum yang mengatur legalitasnya. Sehingga, legislatif tidak tinggal diam dan sudah melakukan sebuah kajian untuk menghasilkan naskah akademis, yang nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan

BERMANFAAT

- Kalangan legislatif mendesak Pemkot Yogya memaksimalkan infrastruktur yang dibangun.
- RTHP punya potensi besar untuk mengungkit ekonomi masyarakat.
- Untuk menjadi potensi ekonomi diperlukan payung hukum.

terkait hal tersebut.

"Problematikanya, kan, di situ. Maka, ungkitan ekonomi harus dibuka. Selama belum ada dasar hukumnya, kami tidak berani memberikan anggaran untuk melangkah ke ungkitan ekonomi," tandas Cahyo. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun memandang, sejauh ini RTHP yang ungkitan ekonominya sudah hidup salah satunya ialah Embung Giwangan, yang berada di Kemantren Umbulharjo. Dengan geliatnya yang dirasakan langsung, terutama di sektor perekonomian, rasa memiliki dari warga masyarakat setempat pun otomatis muncul.

"Sekarang di sana jadi destinasi kampung dan memfasilitasi UMKM. Sehingga, masyarakat punya semangat handarbeni dan ikut terlibat dalam perawatan," ujarnya.

Daya tarik

Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo meresmikan Taman Perwira Lembah Code, sekaligus membuka kegiatan Pasar Sore Ramadan pada Sabtu (16/3) sore lalu.

Menurutnya, citra perkampungan pinggir sungai yang biasanya kotor, kumuh dan tidak terawat, ditepis melalui pemanfaatan kawasan lembah Sungai Code menjadi taman ataupun RTHP di Kelurahan Prawirodijan ini.

"Ini kawasan yang bagus dan punya daya tarik, karena biasanya citra dari kawasan pinggir sungai itu kotor dan tidak tertata, tapi ini sudah disulap menjadi Taman Perwira sebagai ruang publik yang bisa digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas," ujarnya.

Ia menandakan, selain pemanfaatan Taman Perwira sebagai tempat untuk jogging dan bersepeda, bisa pula dikembangkan untuk kegiatan perekonomian, seperti yang dilakukan pada momen kali ini, melalui Pasar Sore Ramadan. Ke depan, ia berharap dari keurahan ataupun wilayah bisa menggerakkan ekosistem yang sudah ada dan diikuti dengan keramah tamahan masyarakatnya. (aka/ord)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005